

PENGARUH KONDISI GEOGRAFIS TERHADAP PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA: STUDI LITERATUR PADA PENDIDIKAN SD/MI

Putri Nabila

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Hasraful Fadila Tinendung

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Lili Kurniasih

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Meifa Tazkia Efendi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Tiasyah Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Eka Yusnaldi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara 20221

Korespondensi penulis: putrinabila040205@gmail.com

Abstract. Indonesia, with its vast and diverse geography, faces challenges in providing equitable education, particularly at the primary and madrasah levels. Geographical factors affect accessibility, the quality of facilities and the distribution of teaching staff in remote and rural areas. This research aims to analyze the influence of geographical conditions on basic education in Indonesia through a literature study. The research method used is a literature study by reviewing journals, government reports and data from the Central Statistics Agency (BPS). The results show that remote areas have limited access to education, inadequate facilities and a shortage of teaching staff. Therefore, a focused policy is needed to address these inequalities to improve the quality and equity of education across Indonesia.

Keywords: Geographical conditions, basic education, primary/middle schools, education accessibility, facilities, teacher distribution, education disparities.

Abstrak. Indonesia, dengan kondisi geografisnya yang luas dan beragam, menghadapi tantangan dalam memberikan pendidikan yang merata, khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Faktor geografis memengaruhi aksesibilitas, kualitas fasilitas, dan distribusi tenaga pengajar di wilayah terpencil dan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kondisi geografis terhadap pendidikan dasar di Indonesia melalui studi literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji jurnal, laporan pemerintah, serta data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil kajian menunjukkan bahwa wilayah terpencil memiliki akses pendidikan yang terbatas, fasilitas yang tidak memadai, dan kekurangan tenaga pengajar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang terfokus untuk menangani ketimpangan ini demi meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. **Kata kunci:** Kondisi geografis, pendidikan dasar, SD/MI, aksesibilitas pendidikan, fasilitas, distribusi guru, kesenjangan pendidikan.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan total 17.504 pulau, di mana sekitar 6.000 di antaranya berpenghuni, dan memiliki beragam kondisi geografis mulai dari dataran tinggi, pegunungan, hutan tropis, hingga wilayah pesisir dan kepulauan (Badan Pusat Statistik, 2021). Kondisi geografis yang sangat beragam ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintah, terutama dalam penyediaan akses pendidikan yang merata. Pendidikan dasar, yang mencakup Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), merupakan fondasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Namun, distribusi pendidikan yang merata sering kali terhambat oleh kondisi geografis, khususnya di daerah terpencil dan terisolasi. Daerah-daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku dikenal sebagai wilayah yang menghadapi tantangan besar dalam penyediaan pendidikan karena lokasinya yang jauh dari pusat ekonomi dan pemerintahan.

Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, 2021), sekitar 35% sekolah dasar di Indonesia berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Tantangan geografis ini tidak hanya mempengaruhi aksesibilitas, tetapi juga mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa di daerah-daerah tersebut. Di beberapa wilayah, siswa harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk mencapai sekolah. Contohnya, di beberapa wilayah pegunungan Papua, siswa harus berjalan kaki selama 2 hingga 3 jam setiap hari untuk mencapai sekolah terdekat (Kemendikbud, 2020). Situasi ini sangat mempengaruhi tingkat partisipasi siswa, di mana angka partisipasi sekolah di Papua mencapai 80,2%, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 93,5% (Badan Pusat Statistik, 2021).

Selain itu, infrastruktur pendidikan di daerah terpencil sering kali tidak memadai. Data dari BPS (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 40% sekolah di daerah pedesaan dan terpencil tidak memiliki fasilitas dasar seperti perpustakaan, laboratorium, atau bahkan akses ke air bersih. Kurangnya fasilitas ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran, di mana siswa di daerah terpencil cenderung mengalami ketertinggalan akademik dibandingkan dengan siswa di daerah perkotaan yang memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang lebih baik. Di beberapa sekolah di pedalaman, misalnya, hanya terdapat satu buku untuk dibagi oleh lebih dari lima siswa, sehingga mereka tidak dapat mengakses materi pelajaran secara efektif (Purnamasari, 2021).

Distribusi tenaga pengajar juga menjadi tantangan besar di daerah terpencil. Data dari Kemendikbud (2021) menunjukkan bahwa banyak guru yang enggan ditempatkan di daerah terpencil karena kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung, seperti transportasi, perumahan yang layak, dan akses terhadap kebutuhan dasar. Di beberapa wilayah, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), rasio guru terhadap siswa sangat tinggi, yaitu 1:60, jauh dari standar

nasional 1:25 (Kemendikbud, 2020). Kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas ini menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran, di mana siswa di daerah terpencil tidak mendapatkan pendidikan yang setara dengan siswa di wilayah lain.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk mengatasi ketimpangan ini. Salah satu program yang paling signifikan adalah Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil. Program Indonesia Pintar juga telah diluncurkan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa bersekolah, termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Namun, meskipun program-program ini sudah berjalan, efektivitasnya masih diragukan karena masalah pengawasan dan distribusi anggaran yang tidak merata (Saputra & Rahayu, 2020).

Tidak hanya itu, tantangan logistik juga menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Banyak sekolah di wilayah pedalaman yang masih sulit dijangkau oleh kendaraan umum atau bahkan transportasi darat. Hal ini mengakibatkan distribusi fasilitas seperti buku, alat-alat pendidikan, dan bahan ajar menjadi sangat terbatas. Di wilayah-wilayah seperti Papua dan Kalimantan Tengah, distribusi buku pelajaran dan perangkat pendidikan seringkali terlambat karena kondisi medan yang sulit dijangkau (Suryadi, 2020). Kondisi geografis yang menantang ini memerlukan solusi yang lebih komprehensif dan terfokus, termasuk pembangunan infrastruktur yang mendukung dan insentif bagi tenaga pengajar yang bersedia ditempatkan di daerah-daerah tersebut.

Selain infrastruktur dan distribusi tenaga pengajar, kebijakan pemerataan pendidikan juga harus mencakup peningkatan kualitas fasilitas di sekolah-sekolah terpencil. Menurut survei yang dilakukan oleh BPS (2021), 15% sekolah di daerah terpencil tidak memiliki ruang kelas yang memadai dan 10% lainnya tidak memiliki akses ke sanitasi yang layak. Akses terhadap air bersih dan fasilitas kesehatan di sekolah juga menjadi masalah besar di daerah-daerah pedalaman, yang berdampak pada kesehatan siswa dan kemampuan mereka untuk belajar secara efektif. Kualitas infrastruktur ini perlu ditingkatkan untuk memberikan lingkungan belajar yang layak bagi siswa di daerah terpencil.

Dengan berbagai tantangan tersebut, penting untuk menyusun kebijakan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan lokal dan kondisi geografis. Solusi-solusi yang ditawarkan harus dapat menjawab permasalahan spesifik di daerah-daerah terpencil, termasuk dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti aksesibilitas, ketersediaan infrastruktur, dan dukungan kepada tenaga pengajar. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana kondisi geografis memengaruhi pendidikan dasar di Indonesia dan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki kesenjangan pendidikan di wilayah-wilayah

yang terpencil dan sulit dijangkau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau *library research*, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari berbagai sumber terpercaya terkait pengaruh kondisi geografis terhadap pendidikan dasar di Indonesia. Studi literatur dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang topik yang diteliti melalui pengumpulan informasi dari berbagai studi dan laporan yang telah dipublikasikan. Metode ini sesuai untuk mengkaji fenomena pendidikan di Indonesia, terutama dalam konteks kondisi geografis yang beragam, di mana data primer sulit diperoleh secara langsung mengingat luasnya wilayah penelitian.

Tahapan Metode Penelitian

1. Pengumpulan Data Sekunder Pengumpulan data dilakukan dengan meninjau berbagai sumber data sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan resmi dari lembaga pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta hasil penelitian terdahulu terkait pendidikan di Indonesia. Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi dan kualitasnya untuk memberikan dasar teoritis dan data empiris terkait aksesibilitas pendidikan, kualitas fasilitas sekolah, dan distribusi tenaga pengajar di wilayah-wilayah dengan kondisi geografis yang berbeda-beda.
2. Seleksi Sumber Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, hanya sumber yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir yang digunakan, kecuali untuk data historis atau referensi penting. Data yang digunakan berasal dari lembaga resmi seperti BPS dan Kemendikbud, serta jurnal akademik yang terakreditasi. Setiap artikel, laporan, dan buku dievaluasi berdasarkan relevansi dengan topik penelitian dan kualitas metodologi yang digunakan dalam setiap penelitian tersebut.
3. Klasifikasi Data Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan data sesuai dengan tema yang relevan.
4. Analisis Data Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk memahami hubungan antara kondisi geografis dan tantangan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada identifikasi pola-pola umum dan perbedaan yang muncul dari berbagai data yang dikumpulkan. Temuan dari berbagai studi literatur kemudian dibandingkan dan dikontraskan untuk memberikan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana kondisi geografis mempengaruhi pendidikan dasar di Indonesia. Selain itu, data statistik dari BPS dan Kemendikbud digunakan untuk memberikan

gambaran kuantitatif mengenai kondisi pendidikan di wilayah-wilayah tertentu.

5. Penarikan Kesimpulan Setelah data dianalisis, kesimpulan ditarik dengan mengaitkan hasil analisis terhadap tujuan penelitian, yaitu untuk memahami pengaruh kondisi geografis terhadap pendidikan dasar di Indonesia dan mengidentifikasi langkah-langkah kebijakan yang dapat diambil untuk mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan terpencil. Kesimpulan penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada temuan yang ada, serta membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji pengaruh kondisi geografis terhadap aksesibilitas, fasilitas pendidikan, dan distribusi tenaga pengajar di Indonesia, dengan fokus pada wilayah-wilayah terpencil yang mengalami berbagai tantangan unik dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Berikut ini adalah beberapa aspek penting yang dibahas dalam kajian literatur ini.

1. Aksesibilitas Pendidikan di Daerah Terpencil Kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam menyebabkan aksesibilitas pendidikan menjadi masalah besar di wilayah-wilayah terpencil. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), sekitar 20% sekolah dasar berada di daerah yang sulit dijangkau, seperti di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku. Siswa di daerah-daerah ini sering kali harus menempuh perjalanan panjang dan melelahkan untuk mencapai sekolah. Sebagai contoh, di Kabupaten Yahukimo, Papua, banyak siswa yang harus berjalan kaki selama dua hingga tiga jam setiap harinya untuk mencapai sekolah terdekat (Kemendikbud, 2020). Hal ini berdampak langsung pada angka partisipasi sekolah di daerah tersebut. Data menunjukkan bahwa di Papua, angka partisipasi sekolah (APS) untuk jenjang SD hanya sebesar 80,2%, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai 93,5% (BPS, 2021). Situasi ini menjadi semakin rumit ketika ditambah dengan minimnya akses transportasi umum, yang membuat siswa sulit untuk bersekolah secara rutin.

Di wilayah pedalaman, keterbatasan infrastruktur jalan dan jembatan menambah kesulitan dalam mengakses sekolah. Di beberapa daerah di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Barat, infrastruktur pendidikan sangat minim, sehingga banyak sekolah yang terisolasi. Pemerintah telah berupaya untuk membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil, namun jumlahnya masih belum mencukupi untuk mengatasi kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Suryadi, 2020).

2. Kualitas Fasilitas Pendidikan Kualitas fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil sangat rendah jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Menurut survei BPS (2021), lebih dari 40% sekolah di daerah terpencil tidak memiliki akses ke fasilitas dasar seperti perpustakaan,

laboratorium, atau akses internet. Fasilitas yang minim ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran dan hasil belajar siswa. Sebagai contoh, di Kabupaten Flores Timur, NTT, hanya 20% sekolah yang memiliki akses internet, dan lebih dari 60% sekolah tidak memiliki perpustakaan (Purnamasari, 2021). Hal ini menyebabkan siswa di daerah tersebut mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber belajar yang memadai, terutama di era digital saat ini.

Selain itu, lebih dari 15% sekolah di daerah pedesaan tidak memiliki ruang kelas yang layak. Sebagian besar ruang kelas di daerah terpencil rusak atau tidak terawat dengan baik, dan banyak di antaranya tidak memiliki ventilasi atau pencahayaan yang memadai (Kemendikbud, 2020). Keadaan ini sangat berbeda dengan sekolah-sekolah di perkotaan, di mana fasilitas pendidikan yang lengkap dan modern tersedia, termasuk laboratorium komputer, perpustakaan yang luas, serta akses terhadap teknologi informasi.

Perbedaan fasilitas pendidikan ini turut memperbesar kesenjangan hasil pendidikan antara siswa di daerah terpencil dan di perkotaan. Siswa di perkotaan cenderung memiliki akses lebih baik terhadap sumber belajar dan teknologi, sehingga mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan akademik. Sementara itu, siswa di daerah terpencil harus menghadapi berbagai keterbatasan yang menghambat proses belajar mereka (Suryadi, 2020).

3. Distribusi dan Kualitas Tenaga Pengajar Salah satu tantangan terbesar dalam dunia pendidikan di Indonesia adalah distribusi tenaga pengajar yang tidak merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Data dari Kemendikbud (2021) menunjukkan bahwa banyak guru yang enggan ditempatkan di daerah terpencil karena minimnya fasilitas pendukung seperti perumahan, transportasi, dan akses kesehatan. Di Papua, misalnya, rasio siswa per guru sangat tinggi, yaitu 60 siswa per guru, jauh di atas standar nasional yang mengharuskan satu guru untuk setiap 25 siswa (Kemendikbud, 2020). Akibatnya, kualitas pembelajaran di kelas menjadi sangat rendah, karena guru harus mengelola banyak siswa sekaligus dengan sumber daya yang terbatas.

Selain masalah distribusi, kualitas guru di daerah terpencil juga menjadi perhatian. Banyak guru di daerah-daerah ini yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Menurut data dari Kemendikbud (2020), 45% guru di daerah terpencil hanya memiliki ijazah setingkat SMA, sementara di perkotaan, mayoritas guru telah menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) atau lebih tinggi (Purnamasari, 2021). Rendahnya tingkat pendidikan guru di daerah terpencil ini berdampak pada kemampuan mereka dalam mengajar dan memfasilitasi pembelajaran siswa, sehingga siswa di daerah-daerah tersebut seringkali tertinggal secara akademis dibandingkan dengan siswa di perkotaan.

Pemerintah telah berusaha untuk mengatasi masalah ini melalui program insentif bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil. Program ini termasuk tunjangan khusus bagi guru yang

mengajar di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Meskipun program ini sudah berjalan, dampaknya belum terlalu signifikan karena kondisi geografis yang sulit masih menjadi faktor penghambat utama (Saputra & Rahayu, 2020). Beberapa guru yang sudah ditempatkan di daerah terpencil akhirnya memilih untuk pindah ke wilayah yang lebih mudah dijangkau karena minimnya fasilitas pendukung dan kondisi kehidupan yang tidak memadai.

4. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi ketimpangan pendidikan akibat kondisi geografis. Salah satu program yang menonjol adalah Program Indonesia Pintar, yang bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu, termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Program ini berhasil meningkatkan partisipasi sekolah di beberapa daerah, namun tantangan logistik dan pengawasan yang kurang memadai membuat distribusi bantuan ini masih belum merata (Saputra & Rahayu, 2020).

Selain itu, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga telah diterapkan untuk membantu sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk yang berada di daerah terpencil. Dana BOS ini digunakan untuk memperbaiki fasilitas sekolah, menyediakan buku dan alat tulis, serta membiayai kegiatan operasional sekolah. Meskipun demikian, masalah pengawasan dan distribusi dana yang tidak merata masih menjadi kendala besar dalam efektivitas program ini (Suryadi, 2020). Pemerintah juga terus berupaya untuk membangun lebih banyak sekolah di daerah-daerah terpencil dan meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan melalui program Pembangunan Sekolah di Daerah Terpencil dan Perbatasan (Kemendikbud, 2021).

1. Namun, kebijakan-kebijakan ini perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan. Pemerintah harus memperhatikan distribusi sumber daya yang lebih merata, termasuk distribusi tenaga pengajar yang berkualitas, peningkatan fasilitas pendidikan, dan penyediaan insentif yang memadai bagi guru yang mengajar di daerah-daerah sulit. Selain itu, pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi juga harus diprioritaskan untuk memudahkan akses siswa dan guru ke sekolah-sekolah yang terletak di daerah terpencil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi geografis di Indonesia, khususnya di wilayah terpencil dan terisolasi, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aksesibilitas, kualitas fasilitas, dan distribusi tenaga pengajar dalam pendidikan dasar (SD/MI). Tantangan yang dihadapi oleh wilayah-wilayah terpencil, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku, mencakup sulitnya akses

menuju sekolah, keterbatasan infrastruktur pendidikan, serta kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas.

Data menunjukkan bahwa aksesibilitas pendidikan di daerah terpencil sangat rendah, dengan angka partisipasi sekolah yang jauh di bawah rata-rata nasional. Selain itu, fasilitas pendidikan di daerah-daerah ini masih sangat terbatas, di mana banyak sekolah tidak memiliki perpustakaan, laboratorium, bahkan akses ke internet, yang semuanya sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Distribusi tenaga pengajar yang tidak merata juga menambah permasalahan, di mana banyak guru enggan ditempatkan di daerah terpencil karena minimnya fasilitas pendukung.

Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi ketimpangan ini, seperti Program Indonesia Pintar dan Dana BOS, tantangan dalam implementasi dan pengawasan kebijakan ini masih menjadi kendala besar. Upaya pemerintah untuk membangun lebih banyak sekolah di daerah terpencil dan meningkatkan insentif bagi guru yang bersedia mengajar di wilayah-wilayah tersebut perlu terus ditingkatkan.

Untuk mengatasi ketimpangan pendidikan ini, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berfokus pada kebutuhan lokal. Pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur yang memadai, memastikan distribusi dana pendidikan yang merata, serta memperkuat insentif bagi guru di daerah terpencil. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan terpencil dapat berkurang, sehingga semua siswa di Indonesia, tanpa memandang lokasi geografis, dapat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Pendidikan Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2020). *Laporan Pendidikan di Daerah Terpencil*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2021). *Program Pembangunan Sekolah di Daerah Terpencil dan Perbatasan*. Jakarta: Kemendikbud.
- Purnamasari, S. (2021). Fasilitas pendidikan di daerah pedesaan: Sebuah kajian. *Jurnal Manajemen Pendidikan*.

Saputra, I., & Rahayu, M. (2020). Evaluasi program Indonesia Pintar di daerah terpencil. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*.

Suryadi, T. (2020). Pendidikan di Indonesia Timur: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*.

Suharto, E. (2021). Motivasi guru di daerah terpencil: Sebuah studi kasus. *Jurnal Manajemen Pendidikan*.

Hastuti, D. (2019). Tantangan pendidikan di daerah terpencil. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*.